

DAMPAK PENERAPAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

Ozi Setiadi¹

Abstrak

Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara. Banyak negara di dunia berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya menghadirkan lembaga pendidikan asing. Lembaga-lembaga pendidikan ini memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional. Akan tetapi, tidak sedikit pertentangan yang mencul akibat maraknya lembaga pendidikan asing di Indonesia karena dinilai dapat melemahkan semangat dan memudahkan nilai-nilai nasionalisme generasi muda.

Tulisan ini akan membahas mengenai dampak penerapan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia dengan menggunakan perpektif hukum, politik dan perubahan sosial guna mengetahui sejauh mana dampak positif dan negatif pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing.

Dampak penerapan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing bila dilihat dari perspektif hukum dan politik, maka akan terlihat adanya kepentingan asing dalam mengatur jalannya proses pembuatan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, Nomor 18 Tahun 2009, dan Nomor 66 Tahun 2009 yang mengakomodir pendidikan oleh lembaga pendidikan asing. Kepentingan para pemilik modal juga terlihat semakin melebarkan pengaruh dalam bisnis perdagangan jasa pendidikan. Indonesia yang secara politis terikat pada perjanjian-perjanjian internasional tidak dapat lepas begitu saja dari kepentingan para pemilik modal, sehingga melalui undang-undang dan peraturan pemerintah

¹ Ozi Setiadi lahir di Kepala Sungai 14 Januari 1987. Lulus S1 dari IAIN Medan dan S2 dari UIN Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.

berbagai kepentingan tersebut diakomodir dan diatur. Sedangkan dalam perspektif perubahan sosial, lembaga pendidikan asing sangat jelas membawa perubahan berupa fisik maupun perubahan non fisik, seperti moral dan akhlak peserta didik hingga masyarakat luas yang mengakibatkan lunturnya nilai budaya nasional dan terkontaminasi oleh budaya global.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa lembaga pendidikan asing selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan domestik, juga memanfaatkan pendidikan di Indonesia sebagai objek kepentingan ideologi, politik, industri dan bisnis.

Kata Kunci: Dampak, Pendidikan, Asing

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan modern saat ini di mana telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap gaya hidup manusia akibat dari globalisasi. Perubahan yang terjadi pada abad XXI ini adalah *human capital* yang merupakan pusat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri kemudian menuju ke masyarakat ilmu.² Adanya perubahan tersebut telah menggeser “masyarakat lama” menuju “masyarakat baru” yang tidak terbatas pada letak geografis. Masyarakat dunia seolah tidak lagi terhalangi oleh batasan wilayah, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat cepat dan mudah didapatkan. Selain itu, lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah.

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah pendidikan belum berhasil membawa perubahan substantif pada bangunan karakter bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi yang unggul.³ Walaupun pada tataran kuantitatif pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun telah banyak diikuti oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih diperlukan perbaikan untuk mencapai kualitas

² Richard Crawford, *In the Era of Human Capital* (New York: Harper Bussiness, 1991) dalam M Habib Chirzin dalam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumberdaya Manusia Abad 21*, Penyunting: M. Dawam Rahardjo (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), cet. 1, 50.

³ Hamzah B. uno, *Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), cet. v, 6.

yang lebih baik, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan pendidikan yang setara dengan masyarakat di negara maju, demikian pula dengan pengajar dan pendidik dapat memperoleh kebebasan akademik.⁴ Oleh sebab itu, kehadiran lembaga pendidikan asing diharapkan mampu membawa perubahan bagi wajah pendidikan nasional.

Uraian singkat di atas memberikan pemahaman pentingnya mengetahui pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing. Untuk itu, tulisan ini ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dalam perpektif hukum, politik dan perubahan sosial? Serta bagaimana dampak positif dan negatif pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing?

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dalam Perspektif Hukum Indonesia

Adanya lembaga pendidikan asing berimplikasi munculnya peraturan dan perundang-undangan pendidikan untuk lembaga pendidikan asing di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan tersebut dibuat dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh penyebaran informasi dan faham yang dapat mengganggu pemahaman terhadap Ideologi Pancasila, budaya, serta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perlu mengatur arus masuk dan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia.⁵

Keadaan demografi yang heterogen menyebabkan masyarakat Indonesia sangat rawan terhadap pengaruh asing yang mungkin membawa berbagai paham dan informasi yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi faktor utama sekaligus lahan subur bagi penyebaran paham dan informasi yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan yang membatasi dan mengatur

⁴ Kebebasan akademik menurut Sulistyowati adalah hak setiap profesor, staf pengajar, dan peneliti terkait kegiatan mereka dalam pengajaran dan penelitian. Tentu saja yang sejalan dengan tradisi universitas, kode etik, prinsip toleransi dan obyektivitas. Sesudah 66 tahun Indonesia merdeka serta menjadi negara demokrasi dan *rule of law*, kebebasan akademik yang paling esensial itu pun masih harus diperjuangkan. Sulistyowati Irianto, "Kebebasan Akademik itu.." *Opini Kompas*, Sabtu, 5 Mei 2012.

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.

pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing akan memudahkan pemerintah mengawasi pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan tersebut karena pelaksanaan sistem pendidikan nasional dapat tercapai dengan melibatkan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁶

Tujuan pemberian izin pelaksanaan pendidikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan asing pada satuan pendidikan formal maupun nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan Indonesia, selain untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁷ Adanya pendidik dan tenaga pendidikan asing diharapkan dapat membantu mencapai tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidik dan tenaga pendidik asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus memiliki kualifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia agar tujuan itu bisa tercapai.⁸ Ini menjadi suatu keharusan guna meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dari sisi pendidikan, maka pemilihan pendidik dan tenaga pendidikan yang tepat sangat diperlukan. Melihat banyaknya alumni pendidikan formal, perguruan tinggi maupun menengah, mengalami kesulitan dalam mengembangkan kreativitas guna bersaing dengan masyarakat dunia.⁹ Oleh sebab itu, pemerintah harus memenuhi kewajiban dengan memberikan hak pendidikan bagi setiap warga negara yang secara tegas sudah diatur dalam konstitusi negara. Termasuk di dalamnya kebebasan akademik, melalui perangkat

⁶ Tujuan diadakannya sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 pasal 2

⁸ Kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan asing agar dapat memberikan pengajaran di Indonesia, selain memiliki kesehatan fisik dan rohani, harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan tempat pengajaran. Misalnya, lulusan S1 untuk pengajar raudatul athfal, TK, pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi berbentuk politeknik dan kademi. Sedangkan berpendidikan sekurang-kurangnya doktor untuk perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 pasal 4 ayat 2.

⁹ Hamzah B. uno, *Profesi Kependidikan*, 6.

hukum harus didukung oleh negara,¹⁰ dilakukan secara demokratis dengan nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia menyebutkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan asing dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari penyebaran paham dan informasi yang dapat memecah persatuan bangsa, diantaranya setiap pendidik dan tenaga kependidikan asing harus membuat surat pernyataan tidak akan terlibat dalam kegiatan propaganda keagamaan, intelijen atau *klandesten*, tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia, dan kegiatan lain di luar izin yang diberikan oleh pemerintah.¹¹ Selain itu, setiap lembaga pendidikan asing yang menggelar pendidikan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia, harus terakreditasi atau diakui di negaranya sehingga dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang sudah terakreditasi pula.¹² Bagi perguruan tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dapat dilakukan selama untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi berdasarkan prinsip toleransi, simbiosis mutualisme, dan tidak mengganggu stabilitas nasional dan internasional.¹³

Aspek penting yang perlu dilihat selain kriteria umum yang disebutkan diatas adalah keadaan penduduk Indonesia yang heterogen dalam beragama. Artinya, faktor agama juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang mana dalam dasawarsa terakhir ini masyarakat Indonesia mengalami peningkatan religiusitas, sehingga pendidikan dapat menjadi kunci keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Sanusi menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan harus melihat dan mempertimbangkan hakikat

¹⁰ Lihat juga Sulistyowati Irianto, "Kebebasan Akademik itu..".

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 pasal 5 ayat 3 butir b

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia pasal 1 ayat 1 dan 2.

¹³ Lihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3.

hidup sebelum dan sesudah alam dunia ini, walau kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan manusia dihadapan Allah swt. lebih luas yaitu kegiatan dalam kehidupan dunia.¹⁴ Pendidikan tidak boleh melupakan agama karena agama menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat. Langkah pemerintah dengan memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan sangat penting dan harus didukung oleh berbagai kalangan dengan tujuan, setidaknya, untuk membentuk masyarakat yang pluralis dan toleran, sehingga kerukunan antar umat beragama dapat tercapai di negeri yang sangat heterogen ini.

Pemerintah mengatur berbagai hal tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 3 ayat 2 yang meliputi pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, lembaga kependidikan lainnya, sarana dan prasarana, penilaian, akreditasi, pengelolaan, hingga pembiayaan. Rencana induk pengembangan satuan pendidikan tersebut diatur sedemikian baik dengan memenuhi standar pengelolaan, sertifikasi internasional, penerapan prinsip kesetaraan gender dan multi-kultural, menjalin hubungan dengan sekolah unggul negara lain dan berorientasi pada prestasi di tingkat internasional.¹⁵ Oleh sebab itu, kurikulum yang dibuat berdasarkan standar isi dan standar kompetensi Indonesia diperkaya dengan standar isi dan standar kompetensi negara asing, sehingga kurikulum yang diterapkan disesuaikan dengan kurikulum dalam negeri dan diperkuat oleh kurikulum lembaga pendidikan, satuan pendidikan negara asing, baik program, jumlah kredit tiap semester, dan lainnya.¹⁶

Peraturan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut harus diikuti dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan asing terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Ini penting untuk dilakukan karena pendidikan harus dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan, maka faktor yang mendasari kontinuitas dan kesinambungan tersebut

¹⁴ Sanusi Uwes, *Visi dan Pondasi Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), cet. I, 11.

¹⁵ Lebih lanjut lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 13.

¹⁶ Lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 6 ayat 2. Selain itu, penggunaan sistem pendidikan yang berasal dari negara lain wajib mendapat izin dari menteri.

harus menjadi perhatian pemerintah diantaranya kebudayaan, kehidupan masyarakat Indonesia, globalisasi, dan perkembangan dunia.¹⁷

B. Pelaksanaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dalam Perspektif Politik

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adi daya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia.¹⁸ Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan perang dunia ke II. Pasca perang dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik – bahkan hal keagamaan seperti *fatwa* sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik.¹⁹

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk lebih dari 240 juta jiwa, saat ini terdapat permasalahan pelik dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kebanyakan hanya tamat Sekolah Dasar (SD), memaksa Presiden Soeharto ketika itu menandatangani *The Delhi Declaration* pada tanggal 16 Desember 1993 beserta delapan pemimpin

¹⁷ Hamzah B. uno, *Profesi Kependidikan*, 34.

¹⁸ Alvin Y. So, *Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World System Theories* (California: SAGE Publications, Inc., 1990), 17.

¹⁹ Lihat lebih lanjut dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim dan Azyumardi Azra, (Singapore: Institute of Southeast Studies, 2003), 168.

negara lainnya.²⁰ Penandatanganan deklarasi tersebut sekaligus menandakan terbukanya jalan bagi negara-negara lain untuk masuk dan bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, organisasi-organisasi internasional juga memberikan peranan penting dalam menciptakan iklim pendidikan global yang berlaku merata di seluruh negara.

UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Keperdulian UNESCO tertuang dalam rekomendasinya tentang “Pendidikan untuk saling Pengertian Internasional, Kerjasama dan Perdamaian dan Pendidikan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan Asasi” (*Recommendation Concerning Education for International Understanding, Cooperation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedom*), yang ditetapkan dalam sidang umumnya di Paris, tanggal 19 November 1974.²¹

Perjanjian internasional mengenai pendidikan, secara tidak langsung, melahirkan “perdagangan” jasa pendidikan. Pendidikan adalah komoditas komersial yang sangat menjanjikan bagi perdagangan jasa sehingga selain kepentingan membentuk kualitas masyarakat Indonesia secara moril dan intelektual, pendidikan juga dapat menjadi sumber tambahan bagi perekonomian negara. Tujuan selain untuk kepentingan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga dapat memperkaya dan membangun masyarakat Indonesia yang demokratis melalui sosial dan ekonomi sesuai dengan komitmen terhadap perjanjian internasional yang terdapat dalam WTO (*World Trade Organization*).²²

²⁰Deklarasi tersebut berisi: *pendidikan merupakan jalan utama bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan universal, kualitas sumber daya manusia, dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya.* (butir 2). Selanjutnya dalam butir 2.4, dinyatakan bahwa: *muatan dan metode pendidikan harus dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar dari pribadi dan anggota masyarakat untuk memberdayakan mereka agar dapat mengatasi masalah yang sangat mendesak yang berupa pemberantasan kemiskinan, peningkatan produktivitas, peningkatan taraf hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjadikan mereka mampu memainkan peran mereka secara benar dalam membangun masyarakat yang demokratis dan memperkaya warisan budaya.* M Habib Chirzin dalam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, 52.

²¹ M. Jamil Ibrahim dalam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, 100.

²² Lihat juga Ali Chaerudin, *Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia* dalam <http://www.docstoc.com/docs/27546438/Dampak->

Kerjasama perdagangan jasa pendidikan tersebut di Indonesia diatur dalam undang-undang dan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara.²³ Ini disebabkan pendidikan merupakan salah satu sektor komoditas perdagangan sehingga untung-rugi sangat mungkin terjadi, maka pengaturan atas hal itu sangat diperlukan. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sektor pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi pengaruh dunia terhadap kepentingan nasional dalam hal penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing.²⁴

Kerjasama pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam bentuk magang, beasiswa, dan penerbitan karya ilmiah. Dengan demikian, seharusnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia terbuka sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan, tapi pelaksanaan pendidikan nasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta domestik ternyata masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, diperlukan peran pendidikan oleh lembaga pendidikan asing untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing tersebut, khususnya dalam perspektif politik – sesuai dengan tujuan tulisan ini dibuat yaitu untuk melihat pendidikan oleh lembaga pendidikan asing salah satunya dari sisi politik. Berawal dari perjanjian internasional mengenai barang dan jasa, Indonesia telah terikat perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain sehingga Indonesia harus menyediakan pasar bagi pelaksanaan perdagangan tersebut. Adanya pasar mendorong pemerintah Indonesia untuk melahirkan sistem yang mengatur transaksi perdagangan agar

Beroperasinya-Lembaga-Pendidikan-Asing-di-Indonesia diakses pada tanggal 5 Mei 2012.

²³ Lihat juga lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tanggal 27 februari 2006 di dalamnya terdapat paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Diantaranya: mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar *Negative List*) dan *Dispute Settlement*.

²⁴ Lihat juga Ali Chaerudin, *Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia*.

tidak “merugikan”. Akan tetapi, dibalik pengaturan tersebut ada berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya kepentingan pemilik modal yang mewarnai pembentukan peraturan dan undang-undang perdagangan jasa pendidikan oleh lembaga pendidikan asing.²⁵ Inilah yang secara politis melahirkan pernyataan, sebagaimana yang dijelaskan Ali Chaerudin, bahwa lembaga pendidikan asing mendapatkan peraturan yang sama dengan lembaga pendidikan domestik sehingga tidak dikenakan aturan-aturan yang diskriminatif. Ia juga mencontohkan Malaysia dalam penerapan kebijakan jasa pendidikan telah berhasil mencapai angka 65.000 pasar pergerakan siswa pada Juni 2008, hingga 2010 Malaysia menargetkan 100.000 siswa asing. Ini terlihat adanya peningkatan pertumbuhan penerimaan siswa asing tersebut sampai tahun 2010 mencapai 24%.²⁶ Pencapaian ini tentunya dilakukan melalui pendekatan politik, budaya, dan agama.

Pernyataan bahwa pendidikan telah tersandera oleh kepentingan para pemilik modal secara teoritis dalam pemahaman Marxisme seakan dapat dibenarkan. Keluarnya rancangan undang-undang pendidikan yang membagi lembaga pendidikan setingkat universitas menjadi tiga golongan yaitu otonom, semi otonom, dan otonom terbatas menjadikan pendidikan seakan semakin mahal di negeri ini.²⁷ Dengan dikeluarkannya rancangan undang-undang tersebut, jelas terlihat bahwa setiap universitas/ perguruan tinggi di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola keuangan. Setiap universitas, secara tidak langsung diberi hak dalam menentukan biaya perkuliahan untuk menutupi biaya operasional universitas. Ini akan berakibat pada naiknya biaya pendidikan di lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia, yaitu universitas baik negeri maupun swasta.

Kenaikan biaya tersebut tentunya akan bermuara pada kesulitan pelajar dalam memenuhi kewajiban pembayaran SPP dan biaya lainnya. Ini tentu berakibat fatal bagi sistem pendidikan Indonesia. Biaya pendidikan yang mahal akan mendorong pihak asing untuk ambil bagian dalam menyelenggarakan pendidikan. Masyarakat selaku konsumen akan beranggapan bahwa pendidikan yang diselenggarakan

²⁵ Kelas borjuasi kapitalis menurut Karl Max adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi dan memperoleh keuntungan kapital dan material dengan cara mengeksploitasi kelas pekerja atau proletar. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet. IV, 270.

²⁶ Lihat Ali Chaerudin, *Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing*.

²⁷ Lebih lanjut lihat dalam Setyo Pamuji, “Pendidikan dalam RUU PT”, *Opini Kompas*, Rabu, 23 Mei 2012.

oleh lembaga pendidikan asing lebih berkualitas dari pada lembaga pendidikan domestik – meskipun belum tentu benar. Dengan biaya yang sama, masyarakat menganggap dapat memperoleh pendidikan dan fasilitas yang lebih baik dari lembaga pendidikan domestik. Akhirnya, ini menjadi *boomerang* bagi pendidikan Indonesia dimana lembaga pendidikan domestik tidak lagi diminati dari pada lembaga pendidikan asing. Tentunya, ini adalah akibat dari kepentingan para pemilik modal yang “difasilitasi” oleh politisi – dalam hal ini lembaga legislatif – Indonesia yang melahirkan undang-undang mengenai sistem pendidikan tersebut. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa apa yang secara normatif digariskan dalam konstitusi itu tidaklah selalu sama dengan realitas yang terjadi secara empirik.²⁸ Rancangan undang-undang tersebut adalah bukti kesenjangan realitas antara teori dan praktek.

C. Pengaruh Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dalam Perspektif Perubahan Sosial

Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan sosial yang ada pada masyarakat dunia. Penduduk dunia yang diramalkan pada tahun 2050 mencapai 9 miliar membutuhkan pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan pendidikan itu sendiri sehingga pendidikan menjadi bagian dari tolok ukur kemajuan suatu negara. Pendidikan muncul sebagai upaya pembangunan rakyat saat negara mulai merenggangkan diri dengan kelas menengah dan kaum intelektual.²⁹ Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu negara, maka dianggap semakin cepat melakukan perubahan sosial. Ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Indonesia karena tingkat pendidikan yang masih tertinggal dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara tetangganya, seperti Malaysia dan Singapura. Kelemahan tersebut menjadi titik fokus bagi pemerintah untuk memperbaiki pendidikan nasional melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan asing.

Lembaga pendidikan asing sangat berkontribusi dalam melakukan perubahan sosial di Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu keberhasilan perubahan sosial yang sangat kontras terlihat. Adanya

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. II, 361.

²⁹ Lihat juga Fachri Ali, “70 tahun Dawam Rahardjo, Kegelisahan Akademik”, *Kompas*, Sabtu, 05 Mei 2012.

lembaga pendidikan asing, membawa kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini dapat terlihat dengan keikutsertaan peserta didik dalam berbagai kegiatan internasional seperti olimpiade pendidikan, pengenalan kebudayaan dan lainnya. Selain berhasil dalam merubah wajah pendidikan di Indonesia, dari sisi ekonomi, adanya lembaga pendidikan asing dapat menambah pendapatan negara, menambah infrastruktur pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkarir dalam bidang pendidikan. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di daerah yang perekonomiannya sudah maju dan masyarakat yang heterogen. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan asing dapat memberikan perubahan yang bersifat materil dan non materil.

Berbagai perubahan sosial tersebut sudah sejak lama menjadi sorotan oleh para ilmuwan. Teori evolusi klasik, sebagaimana yang disebutkan Alvin Y. So, perubahan sosial memiliki ciri sebagai berikut; pertama, mengasumsikan bahwa perubahan sosial searah, bahwa masyarakat yang berbeda bergerak satu petunjuk dari sebuah kondisi sederhana menuju kemajuan negara. Kedua, teori ini mengadakan sebuah nilai pertimbangan dalam proses evolusi – pergerakan menuju akhir dari fase hal baik karena ini menunjukkan kemajuan, manusia dan peradaban. Ketiga, teori ini mengasumsikan bahwa kecepatan perubahan sosial berjalan lambat, sedikit demi sedikit, dan satu demi satu – evolusioner bukan revolusioner.³⁰ Perubahan searah yang dimaksudkan adalah perubahan yang bersifat linear sehingga tahapan-tahapan perubahan tersebut dapat direncanakan untuk menuju suatu kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ciri pertama ini kebanyakan dipopulerkan oleh ilmuan-ilmuan Barat yang mana perubahan sosial dapat mengarah kepada kemajuan atau kemunduran. Teori ini biasanya berlaku dalam kehidupan modern dimana para evolusionis berasumsi bahwa alam semesta didisain untuk manusia dan peradaban, budaya evolusi harus diperintah oleh prinsip yang sama dan mengikuti garis yang sama, dan semua umat manusia akan bergerak menuju sebuah peradaban seperti Eropa.³¹

Setidaknya ada beberapa tokoh yang menyebutkan mengenai perubahan sosial yang bersifat linear tersebut, diantaranya August Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), dan Emile

³⁰ Alvin Y. So, *Social Change and Development*, 19.

³¹ Eva Etzioni-Halevy and Amitai Etzioni, *Social Change Source, Pattern and Consequences* (New York: Basic Book Inc., 1973), 132.

Durkheim (1855-1917). Menurut August Comte setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan manusia, yaitu rasa bosan, lamanya umur manusia, dan demografi pertambahan penduduk secara alamiah.³² Rasa bosan yang ada pada diri manusia mengakibatkan adanya perubahan menuju pada kemajuan. Comte berpendapat bahwa manusia menggunakan kecakapan secukupnya, sesuai dengan porsi dan meningkatkan aktivitas kecakapan. Apabila manusia menggunakan kecakapan yang lebih rendah, ia akan terdorong untuk menggunakan kecakapan yang lebih tinggi sehingga semakin tinggi penggunaan kemampuan manusia maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan.

Lamanya umur manusia juga memberikan efek bagi perubahan sosial dan tentunya mempengaruhi tingkat kemajuan. Comte berpendapat bahwa panjangnya umur manusia akan berpengaruh terhadap pemahaman akan konservatisme. Orang yang memiliki usia lebih lama akan menghambat sebuah kemajuan dimana mereka yang berusia lebih lama akan anti terhadap perubahan-perubahan baru yang muncul dari generasi berikutnya. Umur yang pendek juga memberikan sebuah kendala bagi perubahan. Manusia yang memiliki umur yang lebih pendek (muda) memiliki naluri untuk melakukan perubahan dengan cepat, memberikan terlalu banyak kekuatan pada naluri menciptanya. Ini menurut Comte sama merepotkannya dengan umur yang terlalu lama. Idealnya, usia yang optimum akan menghasilkan tingkat kemajuan yang optimum.

Faktor terakhir yaitu demografi pertambahan penduduk secara alamiah. Comte berpendapat bahwa, selain pertambahan penduduk menjadikan kepadatan penduduk disuatu wilayah, heterogenitas juga mempengaruhi tingkat perubahan dan kemajuan. Banyaknya penduduk menimbulkan keinginan dan masalah baru disamping menimbulkan cara-cara baru untuk mencapai kemajuan. Kepadatan penduduk juga akan memberikan ketimpangan fisik dan mengakibatkan perubahan moral dan intelektual bagi sedikit orang yang tertindas. Sama seperti faktor usia yang telah dijelaskan di atas, dalam hal ini Comte juga memberikan porsi yang ideal agar tercapainya suatu tujuan kemajuan. Secara singkat melalui ketiga faktor tersebut Comte memberikan pengakuan bahwa perubahan sosial itu normal sehingga para sosiolog harus melihat masalah penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju perubahan.

³² Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, Penerj. Alimandan S.U (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 76.

Teori perubahan sosial berbentuk linear lainnya diperkenalkan oleh Herbert Spencer, seorang yang berjasa dalam menulis buku-buku filsafat, biologi, psikologi, etika, dan sosiologi. Spencer, terkait dengan perubahan sosial, memandang bahwa masyarakat adalah organisme yang hidup. Berbeda dengan teori evolusi yang disebutkan oleh Darwin yang menekankan pada hewan, Spencer lebih menekankan pada manusia. Ia menggunakan pengetahuan biologis untuk memahami fenomena sosial karena masyarakat seperti suatu organisme biologis dan dapat dipelajari.³³ Bermula dari proses pertumbuhan manusia diferensiasi dan integrasi yang terjadi terus menerus. Manusia berintegrasi membentuk kelompok-kelompok yang kemudian meluas bergabung dan kemudian terjadi penggabungan ulang mencapai suatu titik dimana nantinya kelompok tersebut akan terpisah menjadi beberapa kelompok kemudian secara bertahap timbul perbedaan satu dengan yang lain. Kaitannya dengan perubahan sosial yang berbentuk linear, Spencer menyebutkan bahwa perubahan itu terjadi dari masyarakat yang homogen menuju masyarakat heterogen yang modern.

Para penganut teori fungsionalis menyebutkan ada beberapa hal untuk memahami kegiatan orang melalui teori organisme. Pertama, perbedaan bagian sebuah organisme biologis dapat disebut untuk menghubungkan kepada institusi yang berbeda yang membuat suatu masyarakat. Kedua, setiap bagian organisme biologis menunjukkan fungsi spesifik untuk kebaikan. Jadi, setiap institusi menunjukkan fungsi tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Ketiga, analogi organisme meletakkan orang-orang untuk memformulasikan konsep dari "*homeostatic equilibrium*" sebuah organisme biologis selalu berada dalam payung negara.³⁴

Sama halnya dengan Comte dan Spencer, Emile Durkheim adalah tokoh yang mendukung perubahan sosial bersifat linear. Perbedaan yang terlihat jelas dengan Spencer adalah Durkheim tidak menggunakan istilah organisme tetapi menggunakan istilah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah bentuk awal, manusia berawal dari kehidupan yang primitif dari sebuah organisasi sosial yang pada masa itu kemudian bentuk awal tersebut juga terjadi pada masa kini. Solidaritas ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memaksa individu maupun kelompok yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama, seperti

³³ Alvin Y. So, *Social Change and Development*, 20.

³⁴ Alvin Y. So, *Social Change and Development*, 20-21.

melanggar sebuah tradisi. Sebaliknya, solidaritas organik justru berakar dalam perbedaan bukan persamaan seperti yang dipahami dalam solidaritas mekanik. Solidaritas ini lebih melihat perbedaan sebagai pelengkap, khususnya dalam pembagian dan pelaksanaan kerja.

Menurut Durkheim, setidaknya ada tiga perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik.³⁵ Pertama, solidaritas mekanik mengikat masyarakat secara langsung sedangkan solidaritas organik tidak, hanya menyebabkan masyarakat saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kedua, dalam solidaritas mekanik ditandai oleh prinsip keyakinan dan kebersamaan dalam masyarakat, sedangkan solidaritas organik lebih pada perbedaan. Ketiga, solidaritas mekanik akan menjadi kuat ketika tidak ada perbedaan antara hak-hak dan kepribadian individu dengan hak-hak dan kepribadian sosial, sedangkan solidaritas organik membutuhkan kedua hak tersebut secara khas. Kaitannya dengan modernisasi, teori Mostow menyebutkan perbedaan yang membedakan fase modernisasi adalah masyarakat yang dinamis. Masyarakat bergerak dimulai dengan masyarakat primitif, sederhana, tidak ada perbedaan tahapan tradisional dan diakhiri dengan kemajuan, kompleks dan masyarakat modern.³⁶

Perubahan sosial yang di jelaskan melalui bentuk/pola linear banyak dilakukan oleh ilmuan-ilmuan Barat. Perubahan tersebut diprediksi melalui tahapan-tahapan perubahan sehingga arah dan tujuan perubahan sosial itu sendiri seakan dapat ditentukan. Selain perubahan sosial yang linear, tidak sedikit para ilmuan Barat berbeda pendapat dan mengungkapkan teori lain yang berbentuk siklus. Dunia Islam mengenal perubahan sosial berbentuk siklus ini melalui teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) kemudian diikuti ilmuan Barat Arnold Toynbee (1889-1975), dan Pitirim A. Sorokin (1889-1968).³⁷

Ibnu Khaldun lahir di Tunis dari golongan bangsawan yang melahirkan banyak tokoh pemikir. Ia juga seorang politikus sebelum pada akhirnya meletakkan profesinya dan berpindah menjadi sosiolog. Khaldun telah melahirkan banyak karya dan karya yang populer adalah *Mukaddimah* di dalamnya banyak terdapat teori-teori sosial yang berkaitan pada peristiwa yang terjadi ketika itu, termasuk di dalamnya

³⁵ Ralph H. Turner, "Type of Solidarity in the Reforming of Human Groups" *Pacific Sociological Review* 10, 1967: 60-68 dalam Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 86.

³⁶ Alvin Y. So, *Social Change and Development*, 33.

³⁷ Lihat Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 41-68.

teori perubahan sosial. Sebuah teori perubahan sosial yang dikemukakannya adalah bahwa kesatuan manusia yang memiliki solidaritas tinggi besar kemungkinan akan mengalahkan kesatuan manusia yang tidak memilikinya.³⁸ Ia juga menambahkan bahwa hal terpenting dalam menciptakan solidaritas tersebut adalah keluarga. Ikatan kekeluargaan melahirkan dorongan alamiah yang membentuk sistem proteksi bagi orang lain.

Khaldun melukiskan rasa solidaritas tersebut dalam dua hal yang berbeda, yaitu nomaden dan menetap. Masyarakat nomaden memiliki keinginan dan kekuatan untuk menyerang masyarakat yang hidup menetap. Mereka merampas dan menaklukkan kota tempat masyarakat urban tinggal dan hidup menetap, tapi kejayaan itu tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya datang penakluk baru dan menduduki tempat yang pada awalnya direbut dari masyarakat yang menetap. Ia menambahkan bahwa proses keruntuhan tersebut hanya perhitungan waktu, ketika waktunya tiba maka keruntuhan itu pasti akan terjadi. Berbeda dengan masyarakat nomaden, masyarakat yang hidup menetap lebih makmur tapi cenderung sekuler dan individualistis. Menurut Khaldun, masyarakat menetap adalah bagian dari masyarakat nomaden dan ini merupakan masa depan masyarakat nomaden dimana kejayaan terjadi saat menetap sebelum pada akhirnya runtuh. Walaupun dapat dikatakan bahwa masyarakat yang hidup menetap dengan masyarakat nomaden berada dalam dua alam yang sama sekali tidak sama.

Secara sederhana teori siklus yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dapat dijelaskan dari beberapa generasi. Pertama, generasi orang yang menggembara dan menaklukkan, berawal dari nomaden kemudian pada generasi kedua menetap pada suatu kota dan mempertahankannya dengan solidaritas yang tinggi. Saat menetap, kehidupan masyarakat mencapai puncaknya dengan kemewahan dan kemegahan tanpa disadari ini semua menggantikan rasa solidaritas dalam kehidupan keras yang ada pada masyarakat nomaden. Ketiga, generasi ini telah melupakan kualitas yang ada pada masyarakat nomaden sehingga menimbulkan korban yaitu kemunduran masyarakat menetap itu sendiri. Generasi keempat, terjadi keruntuhan akibat dari kemunduran yang ada pada generasi ketiga. Singkatnya, ada proses awal kemudian konsolidasi menuju puncak, berada di puncak,

³⁸ Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 44.

mengalami degradasi, kemudian hancur dan kembali ke proses awal yang berbeda.

Arnold Toynbee memiliki pendapat seperti Ibn Khaldun, perbedaannya terletak pada masyarakat atau peradaban sebagai penekanannya dari pada bangsa atau periode waktu tertentu.³⁹ Toynbee melihat peradaban yang lahir dari masyarakat primitif kemudian masyarakat peradaban yang dinamis, tumbuh, dan terus berkembang. Peradaban muncul sebagai akibat dari tantangan. Setidaknya ada lima hal yang mempengaruhi munculnya peradaban berdasarkan pada kawasan yang melatarbelakanginya, yaitu: kawasan yang ganas, kawasan baru, kawasan diperebutkan, kawasan ditindas, dan kawasan tempat pembuangan.⁴⁰ Sebuah peradaban menurut Toynbee tidak akan selalu tumbuh dan berkembang, pada kenyataannya sebuah peradaban akan berada pada titik kehancuran karena tak lagi berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

Toynbee melihat kehancuran sebuah peradaban berawal dari salah satu elemen pembentuk peradaban itu sendiri yaitu masyarakat. Ia berpendapat bahwa perpecahan dalam tubuh masyarakat itu mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam peradaban. Perpecahan jiwa individu kemudian meluas kepada individu yang lain dan meluas lagi pada masyarakat sehingga peradaban hancur dan digantikan dengan peradaban baru yang berlawanan.

Pitirim A. Sorokin juga memandang perubahan sosial berbentuk siklus. Sorokin menggunakan metode “logika penuh arti” (*logico-meaningful*) untuk melihat sebuah perubahan sosial, metode yang memberikan arti terhadap sistem dan setiap unsurnya (subsistem).⁴¹ Ia menawarkan teori lingkaran perubahan sosial yang imajinatif dan didukung oleh banyak data.

Kedua teori perubahan sosial tersebut, baik linear maupun siklus, berkeinginan untuk mencapai puncak kemajuan peradaban. Inilah yang dikenal dengan peradaban modern. Melalui lembaga pendidikan asing sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang maju serta memiliki daya saing terhadap kemajuan internasional. Ini meliputi kemajuan ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang

³⁹ Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 49.

⁴⁰ Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 51.

⁴¹ Robert H. Lauer, *Perspektif Perubahan Sosial*, 58.

melimpah dapat berbuat layaknya negara-negara maju. Sebagaimana dicontohkan oleh Dawam Rahardjo yang menguraikan model pembangunan China berbasis “tenaga rakyat”, ternyata terbukti dapat bertahan dari hantaman krisis yang terjadi di Eropa saat ini. Ia juga mengalami kegelisahan intelektual dalam menghadapi tata cara yang menekan strategi pembangunan yang bersifat *betting on strong* (pertaruhan kekuatan).⁴²

Lembaga pendidikan asing setidaknya harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia seperti lamanya proses pendidikan yang mana harus melewati jenjang pendidikan selama 17 tahun – yang saat ini terjawab dengan adanya kelas akselerasi –, adanya prinsip *irreversibilitas* (ketakterbalikan) sehingga apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan dan aplikasinya tidak dapat diulang kembali, dan globalisasi memperbesar tantangan terhadap masa depan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.⁴³ Berbagai permasalahan ini membutuhkan penyelesaian yang baik agar tujuan perubahan sosial yang telah disebutkan di atas terwujud. Setidaknya, menurut Hamzah B. uno, ada dua hal yang harus diperhatikan agar terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia; pertama, harus ada upaya untuk memberdayakan lembaga pendidikan agar menjadi lembaga *human investment*, dan kedua, melakukan berbagai hal yang mendukung otonomisasi penyelenggaraan pendidikan.⁴⁴

Kharisma Bangsa School of Global Education merupakan salah satu sekolah yang bekerja sama dengan lembaga yang berorientasi pada pendidikan, sosial dan ekonomi yang berasal dari Turki, bernama *Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association* (PASIAD Indonesia). Sekolah ini telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi perubahan sosial, khususnya bidang pendidikan. Kesuksesan para pelajarnya dalam memenangkan olimpiade internasional memberikan nilai positif bagi citra pendidikan Indonesia. Selain keberadaan sekolah yang terletak di pemukiman warga sehingga berdampak bagi lingkungan sekitar, sekolah ini juga berdampak baik bagi hubungan pemerintah dengan lembaga pendidikan yang lain. Ini disebabkan pengaruh prestasi yang diperoleh sekolah tersebut memotivasi pemerintah untuk memberdayakan sekolah-sekolah lain

⁴² Fachri Ali, “70 tahun Dawam Rahardjo, Kegelisahan Akademik”.

⁴³ M. Jamil Ibrahim dalam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, 104.

⁴⁴ Hamzah B. uno, *Profesi Kependidikan*, 7.

agar mampu melakukan “terobosan” lain dalam hal pendidikan. Demikian pula halnya dengan lembaga bimbingan belajar *Ocean Future Education Method* yang bekerja sama dengan lembaga asing yang sama dengan Kharisma Bangsa. Lembaga ini membawa juga perubahan serupa, khususnya bagi para pelajar dan karyawan.

D. Dampak Pelaksanaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia

Lembaga pendidikan asing, dalam perjalanannya membawa berbagai dampak bagi kehidupan sosial di Indonesia. Dampak tersebut tentu terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang muncul sebagai akibat dari adanya lembaga pendidikan asing di Indonesia terbagi ke dalam berbagai bidang di antaranya bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bidang ekonomi sebagai dampak yang dominan muncul melalui adanya pendidikan oleh lembaga pendidikan asing antara lain: pertama, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan dalam bidang jasa pendidikan di dalam negeri sehingga devisa negara meningkat melalui transaksi keuangan warga negara domestik ditambah dengan pajak dari warga negara asing. Kedua, jumlah aset, baik sarana dan prasarana pendidikan meningkat. Dan, ketiga, menyediakan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Bidang sosial, pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing membawa perubahan sosial di mana masyarakat mengalami kecenderungan peningkatan kualitas keilmuan karena adanya daya saing dari dunia internasional.

Pada bidang politik, melalui lembaga pendidikan asing di Indonesia hubungan diplomatik antar negara dapat terbangun sehingga tidak hanya terfokus pada pendidikan tapi meluas dalam bidang ekonomi melalui perdagangan jasa dan produk lainnya. Sama halnya bagi budaya dan ilmu pengetahuan. Adanya lembaga pendidikan asing dapat menjadi media perkenalan bahkan pertukaran nilai-nilai kebudayaan antar negara yang berbeda. Sedangkan bagi ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan asing memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas lembaga pendidikan domestik, dan meningkatkan kemampuan pelajar dalam bersaing dengan pelajar lain dari dunia internasional.

Dampak negatif dari adanya lembaga pendidikan asing di Indonesia di antaranya; pertama, lembaga pendidikan asing dapat

menguasai bidang jasa pendidikan di Indonesia sehingga keuntungan lembaga pendidikan asing akan lebih besar dari lembaga pendidikan domestik. Keuntungan tersebut tentu akan digunakan untuk berbagai kepentingan pihak asing di antaranya peningkatan pengaruh asing di Indonesia. Apabila lembaga pendidikan asing ditiadakan, maka pemerintah Indonesia akan dikenai sanksi dan dipersoalkan oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi internasional, seperti negara yang tergabung dalam WTO, ASEAN, UNESCO dan lainnya. Kedua, biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing tergolong tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bertaraf internasional masih sulit. Kedua, keberadaan lembaga pendidikan asing yang cenderung berada di pusat ibu kota negara atau propinsi juga menjadi kendala bagi masyarakat daerah yang memiliki kemampuan lebih untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ketiga, mahalnya biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing memberikan inisiatif bagi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak mereka keluar negeri, dengan biaya yang sama mereka mendapatkan manfaat yang lebih baik dari sekedar pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia. Lebih jauh lagi, negara tujuan pendidikan akan memperoleh keuntungan melalui masyarakat domestik yang bersekolah di luar negeri karena biaya yang mereka keluarkan selama studi akan menjadi *income* (pendapatan) bagi negara tersebut. Akhirnya, kesenjangan perubahan inilah yang harus menjadi sorotan pemerintah agar kualitas pendidikan nasional dapat tersebar secara merata sehingga memberikan manfaat bagi negara.

KESIMPULAN

Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara. Negara-negara di dunia berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya menghadirkan lembaga pendidikan asing. Dilihat dari perspektif hukum, politik, dan perubahan sosial, lembaga pendidikan asing memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional. Indonesia, terkait dengan perjanjian internasional, telah mengakomodir lembaga pendidikan asing untuk menyelenggarakan pendidikan. Terlihat dari adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang secara khusus membahas menenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga

pendidikan asing. Ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, Nomor 18 Tahun 2009, dan Nomor 66 Tahun 2009.

Dari perspektif politik terlihat adanya kepentingan asing dalam mengatur jalannya proses pembuatan undang-undang. Kepentingan para pemilik modal untuk melebarkan pengaruh dalam bisnis perdagangan jasa pendidikan. Indonesia yang secara politis terikat pada perjanjian-perjanjian internasional tidak dapat lepas begitu saja dari kepentingan para pemilik modal tersebut sehingga melalui undang-undang dan peraturan pemerintah berbagai kepentingan tersebut diakomodir dan diatur. Di satu sisi, ini merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, namun di sisi lain ada banyak kepentingan di balik pembuatan undang-undang dan peraturan tersebut.

Lembaga pendidikan asing sangat jelas dalam membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan non fisik, seperti moral dan akhlak peserta didik dan masyarakat luas. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perubahan tersebut tujuannya untuk mencapai kemajuan dan peningkatan kualitas, namun hal itu tentu berimplikasi pada dampak baik dan buruk penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing tersebut.

Sejalan dengan uraian di atas, penulis menyimpulkan lembaga pendidikan asing selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan domestik, juga memanfaatkan pendidikan di Indonesia sebagai objek kepentingan ideologi, politik, industri dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arskal Salim dan Azyumardi Azra. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Studies, 2003.
- B. uno, Hamzah. *Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010. cet. V.
- Eva Etzioni-Halevy and Amitai Etzioni, *Social Change Source, Patern and Concequences*. New York: Basic Book Inc., 1973.

- Lauer, Robert H. *Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. cet. II.
- Rahardjo, M. Dawam. *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumberdaya Manusia Abad 21*. Jakarta: PT. Intermasa, 1997.
- So, Alvin Y. *Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World System Theories*. California: SAGE Publications, Inc., 1990.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004. cet. IV.
- Uwes, Sanusi. *Visi dan Pondasi Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003. cet. I.

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Media Massa

- Fachri Ali, "70 tahun Dawam Rahardjo, Kegelisahan Akademik", *Kompas*, Sabtu, 05 Mei 2012.
- Setyo Pamuji, "Pendidikan dalam RUU PT", *Opini Kompas*, Rabu, 23 Mei 2012.
- Sulistyowati Irianto, "Kebebasan Akademik itu.." *Opini Kompas*, Sabtu, 5 Mei 2012.

Internet

- Ali Chaerudin, *Dampak Beroperasinya Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia*. <http://www.docstoc.com/docs/27546438/Dampak-Beroperasinya-Lembaga-Pendidikan-Asing-di-Indonesia>. (diakses pada tanggal 5 Mei 2012).